

MENCEGAH & MENANGANI



"Guru dapat
menciptakan
lingkungan belajar
yang aman dan
menyenangkan"

**KEKERASAN
DI SEKOLAH**

**Uswatun Qoyyimah SS., M.Ed., Ph.D
Dr.H. Ali Muhsin S.Ag., M.Pd.**

MENCEGAH & MENANGANI KEKERASAN DI SEKOLAH

Cetakan pertama, Agustus 2018

Penulis:

Uswatun Qoyyimah, SS., M.Ed., Ph.D

Dr. Ali Muhsin S.Ag., M.Pd

Editor:

Yosi Agustiawan, ST., M.MT

Penerbit

Unipdu Press

Komplek Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang 61481

Telp. 0321-855681 Fax:0321-876771

email:press@unipdu.ac.id

ISBN:9-786029-902051

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun

Tanpa izin dari penerbit dan/atau penerbit

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU. No. 19 tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Buku ini disusun sebagai respon atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pentingnya sekolah aman bagi semua sivitasnya. Berita di media arus utama dan media sosial mengenai kekerasan yang menimpa siswa dan guru sangat melukai dunia Pendidikan.

Kata 'kekerasan' dipilih dalam buku ini agar penulis dapat menjelaskan tentang semua jenis kekerasan, pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan dan pada akhirnya memberikan gambaran mengenai pendekatan yang dapat dilakukan oleh para pendidik dalam mencegah dan menangani kekerasan.

Walaupun tidak ada satupun dari kita senang mendengar kata 'kekerasan', kita sebagai pendidik harus membahasnya dan terus memikirkan cara mengantisipasi dan mencegahnya. Terdapat beberapa alasan perlunya para pendidik mengetahui lebih dalam mengenai kekerasan termasuk jenis dan pihak yang berpotensi melakukan kekerasan. Yang pertama, kekerasan membahayakan masa depan generasi bangsa sehingga guru diharapkan mampu melakukan intervensi saat mereka melihat perilaku kekerasan di sekolahnya. Yang ke-dua, guru juga berpotensi melakukan kekerasan tanpa disadari jika

guru tidak mengenali jenis-jenis kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Alasan yang ke-tiga, guru dapat juga menjadi korban kekerasan di sekolah, jika guru tidak mempunyai pengetahuan tentang metode pencegahan terjadinya kekerasan. Dalam hal ini, guru harus melakukan tugasnya dengan baik tanpa ada unsur kekerasan atau pembiaran terhadap terjadinya kekerasan di sekolah.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan masukan dan pencerahan kepada para pendidik mengenai pendekatan dan metode pengajaran yang jauh dari kekerasan. Sehingga, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Pada akhirnya guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Terima kasih penulis ucapkan pada KEMENRISTEKDIKTI yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian kekerasan di sekolah. Ucapan yang sama penulis ucapkan pada pihak-pihak lain yang telah membantu terbitnya buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jombang, 29 Agustus 2018
Uswatun Qoyyimah SS., M.Ed., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB 1. SUMBER KEKERASAN	7
1.1 <i>Sumber Kekerasan langsung</i>	7
1.2 <i>Sumber kekerasan tidak langsung</i>	8
BAB 2. KEKERASAN DI SEKOLAH	21
2.1 <i>Perundungan atau kekerasan?</i>	21
2.2 <i>Jenis kekerasan yang terjadi</i>	24
A. Kekerasan fisik	26
B. Kekerasan non-fisik	29
2.3 <i>Pelaku dan korban kekerasan</i>	37
A. Siswa terhadap siswa	38
B. Sekolah (guru) terhadap siswa	41
C. Siswa terhadap sekolah	46
2.4 <i>Penyebab kekerasan</i>	52
A. Lingkungan keluarga	54
B. Lingkungan sekolah	59

BAB 3. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH	65
3.1 <i>Peran pemerintah</i>	66
3.2 <i>Peran sekolah</i>	73
3.3 <i>Peran Keluarga</i>	75
BAB 4. PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH	77
4.1 <i>Peraturan untuk menangani kekerasan di sekolah</i>	77
4.2 <i>Implementasi peraturan pemerintah di sekolah</i>	84
BAB 5. PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH	91
5.1 <i>Contoh program pencegahan tindak kekerasan</i>	92
A. Root of empathy	93
B. Cooperative learning	95
C. Student surveillance activity	98
D. Konflik resolution	99
E. Kampanye anti-kekerasan	103
F. Kegiatan berkesenian (<i>Art activity</i>)	104
G. Prosedur operasi standar (POS)	106
H. Peran aktif orang tua	108
I. Senyum, Sapa, Salam (3S)	111
5.2 <i>Indikator pelaksanaan program anti-kekerasan</i>	112
5.3 <i>Iklim sekolah pendukung program anti-kekerasan</i>	114
A. Pengembangan profesionalisme guru	115
B. Metode pengajaran yang terfokus pada siswa	119
C. Kepuasan kerja	120
D. Kepemimpinan yang baik	122
E. Membangun hubungan baik dengan orang tua	123
F. Membangun kesadaran kolektif para pendidik	125

BAB 6. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH INDONESIA	127
6.1 <i>Kegiatan program anti-kekerasan di sekolah menengah pertama</i>	129
A. Ritual keagamaan	129
B. Ekstrakurikuler	131
C. Polisi sekolah	133
D. Kesenian	134
6.2 <i>Evaluasi Kegiatan program anti-kekerasan</i>	137
A. Modifikasi kurikulum	137
B. Bimbingan Konseling	139
C. Pengawasan teknis	141
BAB 7. MEMBUAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH	143
7.1 <i>Perencanaan program</i>	143
A. Identifikasi	144
B. Panitia adhoc	147
C. Inventarisasi	147
D. Analisis data dan alternatif solusi	149
7.2 <i>Implementasi program</i>	153
A. Pembuatan prosedur	153
B. Dokumen pelaporan	157
DAFTAR PUSTAKA	159

PENDAHULUAN

Jumlah kasus kekerasan di Indonesia masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) kejahatan disertai kekerasan seperti pengrusakan, aksi premanisme, tawuran, pembunuhan atau pemerkosaan terjadi di Indonesia hampir setiap menit. Tingginya jumlah kasus kekerasan ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama dan budaya luhur bangsa.

Keseriusan institusi pendidikan di Indonesia dalam membina peserta didiknya untuk tidak melakukan kekerasan perlu ditekankan kembali. Yang dimaksud dengan institusi pendidikan sebenarnya tidak hanya lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah, tetapi juga pendidikan informal seperti; keluarga, partai politik, serta organisasi masa yang berbasis agama dan non-agama.

Keluarga dianggap sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Sudah banyak literatur yang membahas tentang pentingnya keluarga bagi generasi mendatang. Sehingga peran orang tua dianggap penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Tidak hanya keluarga, keberadaan organisasi masa dan organisasi politik sebenarnya juga sangat

penting bagi pendidikan masyarakat, khususnya untuk orang dewasa. Sangat disayangkan, anggota/kelompok organisasi masa dalam banyak peristiwa malah melakukan aksi kekerasan baik secara fisik ataupun non-fisik. Sudah seharusnya pengurus organisasi masa atau organisasi politik mendidik, membina, dan menghimbau kepada semua anggotanya agar tidak melakukan kekerasan fisik atau kekerasan non-fisik seperti pengrusakan ataupun melontarkan ujaran kebencian kepada orang diluar kelompoknya.

Bervariasinya lembaga pendidikan informal tersebut sebenarnya menguntungkan karena dapat memberikan alternatif bagi pihak berwenang untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan di berbagai elemen masyarakat. Pihak berwenang dapat melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, pemuka agama/adat, dan tokoh partai politik untuk mendidik anggotanya agar jumlah kasus kekerasan dapat ditekan.

Meskipun pendekatan terhadap lembaga informal memiliki banyak manfaat, pencegahan kekerasan harus dimulai dari lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pemerintah dapat melakukan pencegahan perilaku kekerasan melalui sistem pendidikan yang dibangun melalui kurikulum sekolah. Secara teknis, pencegahan perilaku kekerasan melalui sekolah dianggap lebih efektif daripada pencegahan melalui keluarga inti yang jumlahnya lebih banyak dan lebih bervariasi. Selain itu, program Wajib Belajar sembilan tahun memungkinkan

pesan pesan anti-kekerasan tersampaikan kepada seluruh anak bangsa.

Dari perspektif sosiologi, sekolah mempunyai fungsi utama yakni mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bermoral demi terbentuknya masyarakat yang tertib dan beraturan (Bernstein, 2000). Sehingga, sangatlah ironis jika tindakan kekerasan justru sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti yang dilaporkan oleh The international Center for Research on Women (ICRW) (2015). Menurut ICRW sebanyak 84 persen peserta didik pernah mengalami kekerasan di sekolah Indonesia. Korban dari tindak kekerasan tidak terbatas pada siswa, namun juga meliputi guru, karyawan, atau orang tua.

Kekerasan di sekolah sangat mengancam perkembangan moralitas generasi muda, dan mengancam masa depan bangsa. Untuk itu, kekerasan tidak boleh dibiarkan terjadi di sekolah karena tindakan kekerasan mempunyai dampak buruk terhadap korban ataupun pelakunya. Kekerasan dapat mengakibatkan luka yang permanen pada korban dalam bentuk trauma, cacat fisik, bahkan kematian. Korban menjadi kurang percaya diri, tidak mampu memperoleh pencapaian akademik yang tinggi, mudah terjerumus pada pemakaian obat terlarang dan akan mendapatkan kesulitan dalam bersosialisasi saat dewasa. Begitu juga bagi pelaku kekerasan, mereka akan cenderung melakukan perilaku agresif, dan anti sosial (Sourander, Helstelä, Helenius, & Piha, 2000). Para peneliti terdahulu

telah mengidentifikasi bahwa pada saat dewasa, pelaku akan cenderung melakukan kekerasan terhadap istri/suami dan melakukan hukuman fisik pada anak anaknya (Carney & Merrell, 2001; Smokowski & Kopasz, 2005).

Jika tidak ada usaha pencegahan kekerasan di sekolah, maka sekolah akan menjadi mata rantai yang berkontribusi pada mundurnya peradaban suatu bangsa. Sehingga, muncul pertanyaan; Bagaimana sekolah dapat berfungsi dengan baik jika sekolah tidak mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan bermartabat? Pertanyaan tersebut akan dilanjutkan dengan pertanyaan; Bagaimana sekolah dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam mengurangi kasus kekerasan di masyarakat jika di sekolah justru menjadi tempat menjamurnya kekerasan atau jika sekolah melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi?

Sekolah harus menghentikan segala bentuk kekerasan dalam proses pendidikan siswa dengan pendekatan yang tepat. Sekolah tidak dapat menghentikan kekerasan dengan pendekatan yang mengandung unsur kekerasan. Karena, jika kekerasan diibaratkan sebagai api, kekerasan tidak dapat dihentikan dengan api, namun hanya dapat dipadamkan dengan air. Artinya, perilaku kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tapi dihentikan dengan tindakan yang dapat meredamnya, seperti pendekatan yang dilandasi dengan kasih sayang dan kesabaran.

Merespon tindak kekerasan dengan perilaku kekerasan, sama halnya melanggengkan kekerasan itu sendiri.

Buku ini menjelaskan tentang perilaku kekerasan yang dapat terjadi di sekolah dan menawarkan alternatif pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Pada Bab 1 dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sumber kekerasan. Pada Bab 2 dijelaskan mengenai jenis kekerasan, pelaku dan korban kekerasan, serta penyebab kekerasan di sekolah. Dengan memahami konsep kekerasan tersebut pembaca diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Pada bab 3 dan seterusnya, dijelaskan pula pihak yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan oleh sekolah dalam mencegah kekerasan di sekolah. Sehingga, pendidik dapat mengadopsi program kekerasan yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh pemerintah.

